SKRIPSI TERAPAN



PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) **KOTA DEPOK PERIODE 2015 – 2020**

> Disusun oleh: Salsabila/4417030057 **JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN **JURUSAN AKUNTANSI** POLITEKNIK NEGERI JAKARTA **TAHUN 2021**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

SKRIPSI TERAPAN



PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) **KOTA DEPOK PERIODE 2015 – 2020**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan

kuntansi Keuangan Disusun oleh:

Salsabila/4417030057

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN **JURUSAN AKUNTANSI** POLITEKNIK NEGERI JAKARTA **TAHUN 2021**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama

: Salsabila

NIM

: 4417030057

Tanda tangan:



Tanggal : 17 Agustus 2021

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Salsabila

NIM : 4417030057

Program Studi: Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Periode 2015 – 2020

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA

Anggota Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: 07 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M NIP. 196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : 4417030057

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan Terapan

: Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Depok Periode 2015 – 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing 1

Judull Skripsi

Pembimbing 2

Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak

NIP. 197306152000032001

Aminah, S.E., M.M

NIP. 195909091990032001

<u>JAKARTA</u>

Ketua Program Studi

D4 Akuntansi Kenangan

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak

NIP. 196302031990031001



Hak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Periode 2015 – 2020". Adapun penulisan skripsi ini sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar karena bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan penulis bimbingan, motivasi, saran dan kritik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- 2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
- 3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta
- 4. Ibu Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Aminah, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyelesaian skripsi ini.
- 6. Seluruh dosen Program Studi D4 Akuntansi Keuangan atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menjalankan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
- 7. Papa dan mama terkasih, Alm. Bapak Suharyono dan Ibu Herwati yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
- 8. Adikku Azzam Abdul Aziz yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 9. Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 10. Annis, Euis, Yudith, Zalfa dan Zulfa selaku sahabat yang selalu menemani selama masa perkuliahan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.



lak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 11. Teman-teman kelas AKT B angkatan 2017 yang telah memberikan banyak dukungan terhadap penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan meminta kesediaan dari pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.





Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila

NIM : 4417030057

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Periode 2015 – 2020"

Dengan hak bebas royalty noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal

Yang menyatakan

Salsabila



○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

"Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Periode 2015 – 2020"

Oleh: **Salsabila**

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Depok, kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui analisis persentase kontribusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2015 sampai 2020, realisasi penerimaan PAD terbesar mencapai 117% pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan Pajak Daerah terbesar mencapai 115% pada periode 2015 dan 2017. Kontribusi tertinggi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap PAD mencapai 79,22%, sedangkan kontribusi terendah mencapai 69,52%. Dari semua jenis penerimaan Pajak Daerah, BPHTB memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD selama periode 2015 sampai dengan 2020 yang mencapai 30,94%, sedangkan Pajak Air Tanah memberikan kontribusi terendah dengan hanya mencapai 0,14%. Pemerintah Kota Depok perlu meningkatkan kontrol pengawasan dan mengembangkan potensi-potensi terhadap objek pajak agar mendapatkan hasil yang optimal dari penerimaan Pajak Daerah dan PAD untuk periode selanjutnya.

Kata kunci : Pajak, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah





○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

"Effect of Local Tax Contribution on Original Local Government Revenue (PAD) of Depok City in 2015 – 2020"

By: Salsabila

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the types of taxes collected by the Depok City Government, contributions made to the receipt of Original Local Government Revenue (PAD), and obstacles and efforts made by the Depok City Government in the implementation of local tax collection. This research uses descriptive quantitative methods. The data analysis technique used is through percentage analysis of contributions. The data used in this study is primary and secondary data. The result of this study showed that during 2015 to 2020, the realization of the largest PAD receipts reached 117% in 2015 and the realization of the largest local tax receipts reached 115% in 2015 and 2017. The highest contribution made by Local Tax to PAD reached 79.22%, while the lowest contribution reached 69.52%. Of all types of Local Tax receipts, BPHTB contributed the largest contribution to PAD receipts during 2015 to 2020 which reached 30,94%, while Groundwater Tax contributed the lowest by only reaching 0.14%. Depok City Government needs to increase observation control and develop potentials for tax object in order to get optimal result from local tax receipts and PAD for the following years.

Keywords: Tax, Local Tax, Local Revenue

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITASi			
LEMBAR PENGESAHANii			
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSIiii			
KATA PENGANTARiv			
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK			
KEPENTINGAN AKADEMISvi			
ABSTRAKvii			
DAFTAR TABELxi			
DAFTAR GAMBARxii			
DAFTAR LAMPIRANxiii			
BAB I			
1,1 Latar Belakang1			
1.2 Rumusan Masalah			
1.3 Pertanyaan Penelitian 4			
1.4 Tujuan Penelitian 4			
1.5 Manfaat Penelitian 4			
1.6 Sistematika Penelitian5			
BAB II6			
FINJAUAN PUSTAKA6			
2.1 Pendapatan Asli Daerah 6			
2.2 Pajak Daerah			
2.3 Teori Kontribusi			
2.4 Penelitian Terdahulu12			
2.5 Kerangka Pemikiran			
BAB III			
METODE PENELITIAN15			
3.1 Jenis Penelitian			
3.2 Objek Penelitian			
3.3 Metode Pengambilan Sampel			
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian			
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian			
3.6 Metode Analisis Data			

Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

BAB IV		24
HASIL PE	NELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil	Penelitian	24
4.1.1	Gambaran Umum	24
4.1.2	Struktur Organisasi Badan Keuar	ngan Daerah Kota Depok22
4.1.3	Penerapan Pajak Daerah di Kota	Depok 23
4.2 Pemb	ahasan	26
4.2.1	Kontribusi Pajak Daerah	26
4.2.2	Hambatan dan Upaya	42
		45
PENUTUP		45
5.1 Simp	ulan	45
5.2 Sara	n	46
DAFTAR P	PUSTAKA	47
LAMDIDA	N	40

TEKNIK JAKARTA



Hak Cipta:

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah	3
Tabel 2.1	Tarif Pajak Daerah Kota Depok	11
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Kota Depok	27
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Depok	28
Tabel 4.3	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD	30
Tabel 4.4	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD	32
Tabel 4.5	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD	33
Tabel 4.6	Kontribusi Paja <mark>k Hibura</mark> n Terhadap Penerimaan PAD	34
Tabel 4.7	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan PAD	35
Tabel 4.8	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan P.	AD.36
Tabel 4.9	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan PAD	38
Tabel 4.1 0) Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Penerimaan PAD	39
Tabel 4.11	1 Kontribusi PBB P2 Terhadap Penerimaan PAD	40
Tabel 4.12	2 Kontribusi BPHTB Terhadap Penerimaan PAD	41

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



DAFTAR GAMBAR

I	•
a	
~	
0	
0	
ta	
••	

Gamb
Gamb
Gamb
Gamb
Gamb
Daera
Gamb
Daeral
Gamb

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir14
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok22
Gambar 4.2	Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah27
Gambar 4.3	Grafik Penerimaan Pajak Daerah28
Gambar 4.4	Stiker Kegiatan Usaha Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak
Daerah	43
Gambar 4.5	Stiker Kegiatan Usaha Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak
Daerah	44
Gambar 4.6	Stiker Kegia <mark>tan Usah</mark> a Belum Membayar Pajak44





C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Pencarian Data (Politeknik Negeri Jakarta)49		
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian (Kesatuan Bangsa dan Politik)50		
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian (Badan Keuangan Daerah)51		
Lampiran 4	Data PAD 2015 – 202052		
Lampiran 5	Data Pajak Daerah 2015 – 202053		
Lampiran 6	Hasil Wawancara dengan Ka. Subid Pendataan dan Pendaftaran59		





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi saat ini, upaya untuk tetap mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai macam bidang, termasuk dalam mendanai dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya (Habibi, 2015). Pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi pengelolaan dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara sedangkan pemerintah daerah masih ketergantungan dalam pembiayaan daerah terhadap pemerintah pusat (Gomies & Pattiasina, 2011).

Menurut Kartika (2019), dengan adanya desentralisasi maka daerah otonom memiliki wewenang dalam menentukan alokasi sumber daya ke dalam anggaran dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi, dan Lain-Lain PAD yang sah. PAD bertujuan agar memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang nantinya akan digunakan untuk mendanai pembangunan dari suatu daerah.

Berdasarkan struktur ekonomi, Kota Depok memiliki potensi unggulan di sektor tersier yang meliputi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sub sektor jasa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019, Kota Depok memiliki laju pertumbuhan sebesar 6,74% dengan jumlah penerimaan PAD sebesar Rp1.293.003.445.249 yang mengalami kenaikan sebesar 22% dari tahun sebelumnya. Dalam penerimaan PAD, Pajak Daerah menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar Rp1.018.687.961.624 atau sebesar 78% dari komponen PAD lainnya.



Hak Cipta :

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Kota Depok merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar yang berasal dari pendapatan daerahnya. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah Kota Depok harus lebih mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan daerahnya.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut serta semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Asteria, 2015). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Pajak Daerah dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pemerintah daerah dapat memungut pajak yang memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Kota Depok memilih 9 jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diprediksikan akan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PAD yang dapat digunakan sebagai alat penopang bagi perekonomian serta pembangunan di Kota Depok.

Kontribusi Pajak Daerah merupakan besaran pengaruh atau jumlah yang diberikan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD. Semakin besar kontribusi yang diberikan maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini akan berjudul "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Periode 2015 – 2020".



○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang ada. Dalam tabel 1.1 dapat dilihat pendapatan daerah Kota Depok yang akan menjadi rumusan masalah dari penelitian ini:

Tabel 1.1 Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kota Depok (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
2015	818.204.601.264	618.870.326.330
2016	922.297.784.280	683.925.218.835
2017	1.210.748.605.561	841.743.994.169
2018	1.059.700.280.694	839.491.835.275
2019	1.293.003.769.037	1.018.129.612.075
2020	1.215.039.201.530	949.575.773.211

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain yang Sah. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan PAD yang merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah otonom, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin berkurang.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah akan mempengaruhi jumlah penerimaan PAD. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi Pajak Daerah akan sangat mempengaruhi kontribusi yang akan diberikan terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD di Kota Depok dengan menggunakan analisis persentase kontribusi pada periode 2015 – 2020, sehingga dalam penelitian ini rumusan

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta :

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

masalahnya adalah seberapa besar pengaruh kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD di Kota Depok pada periode 2015 – 2020.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penerapan Pajak Daerah di Kota Depok?
- Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok pada periode 2015-2020?
- 3. Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- 1. Menjelaskan jenis Pajak Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok.
- 2. Menganalisis kontribusi Pajak Daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok pada periode 2015-2020.
- 3. Menjelaskan hambatan dan upaya pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1. Bagi Pemerintah Kota Depok
 - Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Depok dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan PAD sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- Bagi Politeknik Negeri Jakarta
 Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan
 Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD Kota Depok.



○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

3. Bagi Peneliti

Dengan megadakan penelitian ini, diharapkan dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah kedalam objek yang sesungguhnya khususnya yaitu Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan metode atau urutan dalam penulisan Skripsi, penulis berpedoman dalam buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi oleh Politeknik Negeri Jakarta. Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan terdiri dari subbabsubbab yang terhubung satu sama lain, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang mendukung penyusunan penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil analisis data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Depok dengan menggunakan metode dan teknik yang telah diuraikan pada bagian metodologi penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh langkah proses pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan bagi Pemerintah Kota Depok.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 yaitu Pajak Hotel, Pajak Retoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB P2 dan BPHTB. Kota Depok memilih 9 jenis pajak tersebut karena dinilai memiliki potensi besar dalam penerimaan Pajak Daerah.
- 2. Selama periode 2015 sampai dengan 2020, rata-rata kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD di Kota Depok adalah sebesar 75,90%. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah dinilai sudah sangat baik bagi penerimaan PAD di Kota Depok karena sudah mencapai lebih dari 50%.
- 3. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah terdapat hambatan seperti tidak adanya aplikasi yang mendukung untuk melakukan pembayaran secara praktis dan Wajib Pajak yang belum mengetahui tentang kewajibannya untuk membayar pajak. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menciptakan aplikasi untuk melakukan pembayaran pajak secara praktis dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Tercapai atau tidaknya realisasi penerimaan Pajak Daerah dipengaruhi oleh potensi-potensi yang ada dari setiap jenis pajak di Kota Depok, pertumbuhan ekonomi secara mikro dan makro, daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

- Dalam meningkatkan jumlah sumber penerimaan PAD, Pemerintah Kota Depok perlu menggunakan teknik analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam menggali potensi sumber-sumber PAD terutama pada Pajak Daerah.
- 2. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran dalam membayar pajak terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan salah satu faktor penunjang dalam tercapainya realisasi penerimaan PAD, dimana PAD merupakan sumber untuk membiayai pembangunan daerah.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikai



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta :

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press. Tersedia dari

https://play.google.com/store/books/details?id=48dVDwAAQBAJ

- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.

 Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
 Program Magister Manajemen, 2(1), 51–61.

 https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162
- Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Diakses pada 14 Juli 2021, dari https://bkd.depok.go.id
- Elim, I., & Ersita, M. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889–897.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 21(1), 1. https://doi.org/10.34209/equ.v21i1.628
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 117–124. https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Manajemen, J., & Ekonomi, F. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN



Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) di KOTA MANADO TAHUN 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4), 47–58.

- Meilda Ellysa Putri, dan S. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution on. Jurnal *E-Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Putu Kartika, K. (2019). Jemma | Jurnal of Economic, Jemma Jurnal of Economic, Management and Accounting, 2(4), 45–52.
- STEVANUS J. GOMIES, & VICTOR PATTIASINA. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Aset, 13(2), 175-184.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Udayana, E. A. U. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 15, 1510–1535.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. (2018). Pajak Daerah dalam Daerah. Yogyakarta: Deepublish. Tersedia Pendapatan dari https://play.google.com/store/books/details?id=c1tHDwAAQBAJ



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pencarian Data (Politeknik Negeri Jakarta)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425 Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting Laman: http://www.pm.as.id/e-pos: humas@pnj.ac.id

Nomor : B/ 455 / PL3.10/DA.04.10/2021 Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Depok, 30 Juni 2021

Kepada

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah/BKD di Kantor Pemerintahan Depok Jl. Margonda Raya No. 54, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat

Dalam rangka memenuhi kewajiban kurikulum dan pembuatan skripsi Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Program Studi D4 Akuntansi Kcuangan, dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan informasi serta data kepada mahasiswa kami:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Kontak
1.	Salsabila	4417030057	089635126196 (WA) bilasalsa361@gmail.com

untuk melaksanakan penelitian di Pemerintahan Kota Depok, guna melengkapi data dalam penyusunan Skripsi sebagai syarat kelulusan. Berikut keperluan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 1. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2014-2019
- 2. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2019
- 3. Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2014-2019
- 4. Laporan Target dan Realisasi Setiap Jenis Pajak Daerah tahun 2014-2019
- 5. Data lain yang sekiranya diperlukan dan wawancara

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

R Elly Mirati, S.E., M.M. NIP 196112221989102001

Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK MEGER MAKARIN

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian (Kesatuan Bangsa dan Politik)

PEMERINTAH KOTA DEPOK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Gedung Dibaleka I Lantai IV, Jln. Margonda Raya No. 54, Kota Depok Telp. Fax. 021-77206784 **REKOMENDASI PENELITIAN** Nomor: 071/785 - Kesbangpol Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok. Memperhatikan Surat dari Politeknik Negeri Jakarta Nomor B/445/PL3.10/DA.04.10/2021 Tanggal 30 Juni 2021 Permohonan Izin Pengambilan Data MEMBERITAHUKAN BAHWA: Salsabila / 4417030057 Ji Taufiqurrahman RT 003 RW 001 Kel. Beji Timur, Kec. Beji. Kota Depok 089635126196 1) Melakukan penelitian, dengan proposal penelitian berjudul : Lokasi Penelitian Badan Keuangan Daerah Kota Depok Waktu/Lama Penelitian 14 Juli 2021 s.d. 31 Juli 2021 Anggota Tim Peneliti Bidang Penelitian Akuntansi Keuangan Status Penelitian Baru dan rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya. Depok, 13 Juli 2021 a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA NDARU PRASOJO Penata 7/k. I (III/D) NP 19790629 199711 1 001

Catatan : Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
 Hak Cipta:

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kary
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidika

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

POLITEGERS AND ANGERS AND ANGERS ANGE

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian (Badan Keuangan Daerah)

PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217364 Fax 77217364
DEPOK - JAWA BARAT 16431

SURAT KETERANGAN

Nomor: 970 /2213 - BKD.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ramdhani. S.Sos NIP : 197509092008011007

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pajak Daerah 1

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Salsabila No. Pokok : 4417030057 Bidang Penelitian : Akuntansi

Sekolah : Politeknik Negeri Jakarta

Telah melakukan riset / penelitian / Pengambilan data pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok terhitung mulai tanggal 14 Juli s/d 31 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 31 Juli 2021

KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BIDANG PAJAK DAERAH 1

MOHAMAD RAMDHANI.S.SOS NIP:157509092008011007

Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Lampiran 4 Data PAD 2015 – 2020

Tabel Data Pendapatan Asli Daerah 2015 - 2020

Tahun	Anggran	Realisasi
2015	697.154.396.353	818.204.601.265
2016	847.022.899.152	922.297.784.280
2017	1.078.263.821.181	1.210.748.605.561
2018	1.007.434.833.378	1.059.700.280.694
2019	1.138.499.654.711	1.293.003.769.037
2020	1.140.891.422.839	1.215.039.201.530

Sumber: Badan Keuangan Daerah

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Lampiran 5 Data Pajak Daerah 2015 – 2020

Tabel Pajak Daerah Tahun 2015 (dalam rupiah)

URAIAN	2015	
	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	540.080.698.574,00	618.870.326.330,00
Pajak Hotel	10.982.447.674,00	12.218.619.716,00
Pajak Restoran	70.830.875.000,00	82.865.611.730,00
Pajak Hiburan	10.583.815.900,00	13.050.134.767,00
Pajak Reklame	9.363.000.000,00	10.009.862.247,00
Pajak Penerangan	74.400.000.000,00	81.171.888.159,00
Jalan		
Pajak Parkir	7.060.560.000,00	9.162.477.803,00
Pajak Air Bawah	1.860.000.000,00	1.486.292.605,00
Tanah		
Pajak Bumi dan	145.000.000.000,00	155.730.178.397,00
Bangunan		
Perdesaan dan		
Perkotaan	POLITE	KNIK
Bea Perolehan Hak	210.000.000.000,00	253.175.260.906,00
Atas Tanah dan	NEGER	
Bangunan	IVAVD.	ГЛ

Sumber: Badan Keuangan Daerah

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Tabel Pajak Daerah Tahun 2016 (dalam rupiah)

URAIAN	2016	
UKAIAIV	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	626.906.035.586,56	683.925.218.835,00
Pajak Hotel	14.109.322.900,00	15.201.041.173,00
Pajak Restoran	91.126.061.744,56	101.401.354.748,00
Pajak Hiburan	14.159.869.458,00	15.877.071.117,00
Pajak Reklame	9.470.642.050,00	10.159.113.228,00
Pajak Penerangan	80.530.000.000,00	81.363.934.521,00
Jalan		
Pajak Parkir	8.776.784.000,00	9.860.316.099,00
Pajak Air Bawah	1.633.355.434,00	1.350.296.294,00
Tanah		
Pajak Bumi dan	174.000.000.000,00	192.371.329.408,00
Bangunan		
Perdesaan dan		
Perkotaan		
Bea Perolehan Hak	233.100.000.000,00	256.340.762.247,00
Atas Tanah dan	POLITE	KNIK
Bangunan	O E I I E	

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Tabel Pajak Daerah Tahun 2017 (dalam rupiah)

URAIAN	2017	
UKAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	734.844.351.531,87	841.743.994.169,00
Pajak Hotel	15.727.037.769,00	16.911.192.922,00
Pajak Restoran	117.554.473.246,00	123.857.369.383,00
Pajak Hiburan	17.250.373.082,00	18.297.055.948,00
Pajak Reklame	10.423.720.689,07	11.438.416.719,00
Pajak Penerangan	83.890.366.928,50	87.714.619.295,00
Jalan		
Pajak Parkir	10.340.983.439,00	10.803.749.215,00
Pajak Air Bawah	1.657.396.378,30	1.732.297.399,00
Tanah		
Pajak Bumi dan	223.000.000.000,00	240.855.105.795,00
Bangunan		
Perdesaan dan		
Perkotaan		
Bea Perolehan Hak	255.000.000.000,00	330.134.187.493,00
Atas Tanah dan	POLITE	KNIK
Bangunan	CEIL	

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta:

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Tabel Pajak Daerah Tahun 2018 (dalam rupiah)

URAIAN	2018	
UKAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	798.022.506.200,00	839.491.835.275,00
Pajak Hotel	17.613.227.580,00	18.637.834.239,00
Pajak Restoran	126.334.953.400,00	153.248.406.091,00
Pajak Hiburan	17.883.109.977,00	21.555.377.570,00
Pajak Reklame	11.882.993.637,00	12.586.819.937,00
Pajak Penerangan	88.978.830.000,00	95.387.796.847,00
Jalan		
Pajak Parkir	11.697.081.783,00	12.226.702.693,00
Pajak Air Bawah	1.720.309.823,00	1.757.568.462,00
Tanah		
Pajak Bumi dan	250.840.000.000,00	255.546.590.278,00
Bangunan		
Perdesaan dan		
Perkotaan		
Bea Perolehan Hak	271.072.000.000,00	268.544.739.158,00
Atas Tanah dan	POLITE	KNIK
Bangunan	VESER	

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta: 1. Dilarang mengutip sebagian a. Pengutipan hanya untuk kep b. Pengutipan tidak merugil

Tabel Pajak Daerah Tahun 2019 (dalam rupiah)

URAIAN	2019	
UKAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	911.161.768.399,00	1.018.129.612.075,00
Pajak Hotel	18.965.132.960,00	19.334.983.691,00
Pajak Restoran	150.027.450.000,00	202.743.727.278,00
Pajak Hiburan	20.098.265.500,00	29.611.945.201,00
Pajak Reklame	16.742.040.340,00	20.006.780.752,00
Pajak Penerangan	93.409.000.000,00	101.973.307.355,00
Jalan		
Pajak Parkir	13.339.840.000,00	16.224.074.558,00
Pajak Air Bawah	2.625.000.000,00	5.974.950.385,00
Tanah		
Pajak Bumi dan	291.119.219.140,00	295.359.708.643,00
Bangunan		
Perdesaan dan		
Perkotaan		
Bea Perolehan Hak	304.835.820.459,00	326.900.134.212,00
Atas Tanah dan	POLITE	KNIK
Bangunan		

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARITA

Hak Cipta:

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Tabel Pajak Daerah Tahun 2020 (dalam rupiah)

URAIAN	2020	
UKAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	899.112.226.167,00	949.575.773.211,00
Pajak Hotel	7.500.000.000,00	9.361.392.706,00
Pajak Restoran	131.000.000.000,00	143.298.280.188,00
Pajak Hiburan	19.733.681.908,00	9.891.080.404,00
Pajak Reklame	25.413.318.204,00	28.672.891.179,00
Pajak Penerangan	105.532.357.765,00	107.430.537.906,00
Jalan		
Pajak Parkir	8.600.000.000,00	8.895.602.522,00
Pajak Air Bawah	8.850.000.000,00	9.906.293.634,00
Tanah		
Pajak Bumi dan	264.482.868.290,00	274.233.365.292,00
Bangunan		
Perdesaan dan		
Perkotaan		
Bea Perolehan Hak	328.000.000.000,00	357.886.329.380,00
Atas Tanah dan	POLITE	KNIK
Bangunan	I OLIIL	

Sumber: Badan Keuangan Daerah



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Ka. Subid Pendataan dan Pendaftaran

Transkip Wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Nama : Mohamad Ramdhani, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah 1

Waktu : Jumat, 30 Juli 2021

SB: Bagaimana cara menentukan dan menetapkan target Pajak Daerah di Kota Depok?

MR : Yang pertama kita harus tahu dulu potensinya karena target adalah sebuah capaian dimana kita harus bisa bekerja sesuai dengan kerangka dan koridor. Kalau tidak ada target, kira-kira tujuan-tujuan itu tidak ada. Kalau untuk pajak yang pasti kita lihat potensi pajak, yaa potensi pajaknya dari mana? Yang pertama dari realisasi tahun kemarin, kalau secara pajak keseluruhan ya berarti potensi dari masing-masing pajak tersebut. Contohnya potensi resto seperti apa, pertumbuhan ekonomi seperti apa, inflasi kita sedang seperti apa. Tapi kalau mau jujur, sebenernya penentuan target itu tidak akan kurang dari realisasi kemarin dan tinggal kita lihat potensinya ada atau tidak. Jadi pada intinya penentuan target dengan melihat data realisasi tahun kemarin, potensi kedepan, pertumbuhannya seperti apa. Kalau misalkan Pajak Restoran, kita lihat berapa restoran yang tahun ini akan dibangun atau akan bangkrut. Lalu tingkat inflasi, daya beli masyarakat. Tidak mungkin kita targetin banyak tapi orang tidak ada yang beli.

SB: Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam penetapan target Pajak Daerah di Kota Depok?

MR : Ya tadi potensi pajak yang ada di Kota Depok, tingkat inflasi, ekonomi mikro dan makro, daya beli masyarakat. Kalau saya sih melihatnya kenyataan ya, seperti tingkat inflasi, apakah tingkat inflasi berpengaruh? Ya pasti berpengaruh. Daya beli masyarakat apa berpengaruh? Berpengaruh. Liburan apakah berpengaruh? Ya pasti berpengaruh, satu tahun kedepan banyak libur ya pasti berpengaruh. Target



○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

bukan merupakan akhir, tapi dengan target kita mempunyai kerangka. Target bisa dirubah tidak? Sangat bisa. Kapan bisa dirubah? Ya sesuai dengan aturan. Misalkan tingkat penghuni kost di Depok, kalau tidak ada kampus siapa yang mau kost? Sementara salah satu instrumen Pajak Hotel adalah rumah kost, bayar tidak pajaknya? Ya enggak dong, kan kosong. Penentuan target itu sudah kita lihat potensinya.

SB : Berdasarkan data yang telah diberikan, pada tahun 2014 realisasi Pajak Daerah tidak melampaui target dikarenakan 4 instrumen Pajak Daerah yakni Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan PBB P2 tidak mencapai target. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan realisasi pajak tersebut tidak mencapai target?

: Kalau Pajak Reklame tidak mencapai target dikarenakan disini sudah MR mulai Pajak Rokok itu tidak boleh, pemerintah Kota Depok sudah tidak menerbitkan lagi tentang Pajak Rokok. Kalau Pajak Rokok nya sudah tidak terambil maka otomatis pasti akan ada pengurangan, tapi memang kalau boleh dilihat pada tahun 2013 prediksinya juga terlalu kencang juga dari realisasi 2013 nya 8 Miliar mau hajar 10 Miliar kan dengan asumsi keyakinan tadi tapi ternyata Pajak Rokok sudah tidak boleh. Selanjutnya Pajak Penerangan Jalan, bisa jadi karena ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh Pajak Penerangan Jalan karena semuanya ada di PLN. Misalkan PLN bikin di 2014 kebijakan di atas 450 watt gratis, ada diskon, lalu orang hemat gitu pakai listriknya, kan tidak kena pajaknya. Lalu PBB P2 karena tingkat daya beli masyarakat yang hampir sama dengan 2018 yang BPHTB nya tidak tercapai. Ketika BPHTB nya tidak tercapai maka pajaknya juga tidak akan tercapai, tapi dia pasti lompatannya akan tinggi. PBB kan bagian dari masyarakat, jadi kemungkinan tidak mau bayar. Dan yang terakhir Pajak Air Tanah, itu sebenarnya dulu ada dualisme. Pajak Air Tanah itu kalau orang ngambil airnya dari bawah tanah itu sebenarnya kena pajak tapi untuk bisnis. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi, 2014 itu belum ada kita kasih meteran. Jadi tadi sekali lagi, penentuan pajak sesungguhnya bukan hanya dari Pemerintah Daerah tapi juga penentuan pajak dari legislatif.



Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SB: Pada tahun 2018, target dan realisasi penerimaan PAD terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut?

MR : Ada yang dulunya masuk kedalam instrumen PAD dihilangkan, salah satunya adalah dana untuk anak sekolah. Jadi ada dana yang dari pemerintah itu namanya BOS itu dianggapnya penerimaan tapi akhirnya tidak jadi dianggap penerimaan. Tapi untuk di Pajak Daerah sebenarnya tidak ada masalah. Misalkan di lain-lain PAD yang sah, ada orang mau kasih tapi tidak kasih lagi kan tidak ditargetkan. Berarti ada kalau tidak ditargetkan berarti ambilnya dari pendapatan lain-lain PAD yang sah. Kalau dari angka berarti tidak dianggarkan, kalau tidak dianggarkan berarti potensinya tidak ada.

SB: Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah? Dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?

MR : Kalau kendala pasti ada, misalnya Wajib Pajak susah untuk membayar pajak maka kita tempelkan stiker, masih tidak mau bayar juga? Kita lakukan penyegelan, dan pada akhirnya masih tidak juga membayar? Maka kita akan tutup secara undang-undang. Lalu mungkin jaman dulu orang masih mau pegang bukti fisik, tapi sekarang orang sudah familiar dengan online maka kita buat aplikasinya. Dulu kalau bayar hanya bisa di kantor pos dan giro? Sistemnya kita perbarui, sekarang sudah bisa melalui indomaret, alfamart, bahkan shopee. Orang tidak mau bayar pajak kalau tidak ada unsur paksaan dikarenakan tidak mengerti tentang pajak, maka kita lakukan sosialisasi.